

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi inflasi telah diungkapkan banyak peneliti ekonomi, sehingga banyak pandangan terkait penjelasan inflasi. Menurut Indriyani (2016), inflasi yaitu ketika semua harga barang dan jasa secara bersamaan terus mengalami peningkatan. Kantur & Özcan (2022) menambahkan bahwa jika terjadi peningkatan pada beberapa komoditas, dan peningkatan tersebut tidak terjadi secara terus menerus, maka tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.

Kose *et al.* (2020) memandang bahwa inflasi menjadi indikator standar biaya hidup suatu negara. Inflasi meningkat berarti standar biaya hidup suatu negara turun, karena masyarakat banyak mengeluarkan uang untuk mendapatkan jumlah barang atau jasa yang sama pada periode sebelum peningkatan inflasi. Ningsih & Andiny (2018) juga berpendapat bahwa inflasi berarti menurunnya daya beli konsumen dan pendapatan riil.

Pandangan-pandangan para peneliti ekonomi yang telah diungkapkan menjadikan inflasi sebagai isu ekonomi yang penting untuk diteliti. Inflasi menjadi isu penting dalam ekonomi karena mempengaruhi semua aspek ekonomi, mulai dari belanja konsumen, investasi bisnis, dan lain-lain, maka dari itu pengendalian inflasi perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan (Galati *et al.*, 2011). Pengendalian inflasi bertujuan untuk menstabilkan kondisi makroekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga tidak menghambat kinerja perekonomian suatu negara (Iqbal *et al.*, 2022).

Hall *et al.* (2022) mengatakan bahwa pengendalian inflasi sebenarnya dapat dilihat dari faktor penyebab inflasi, misalnya faktor *supply side* atau faktor

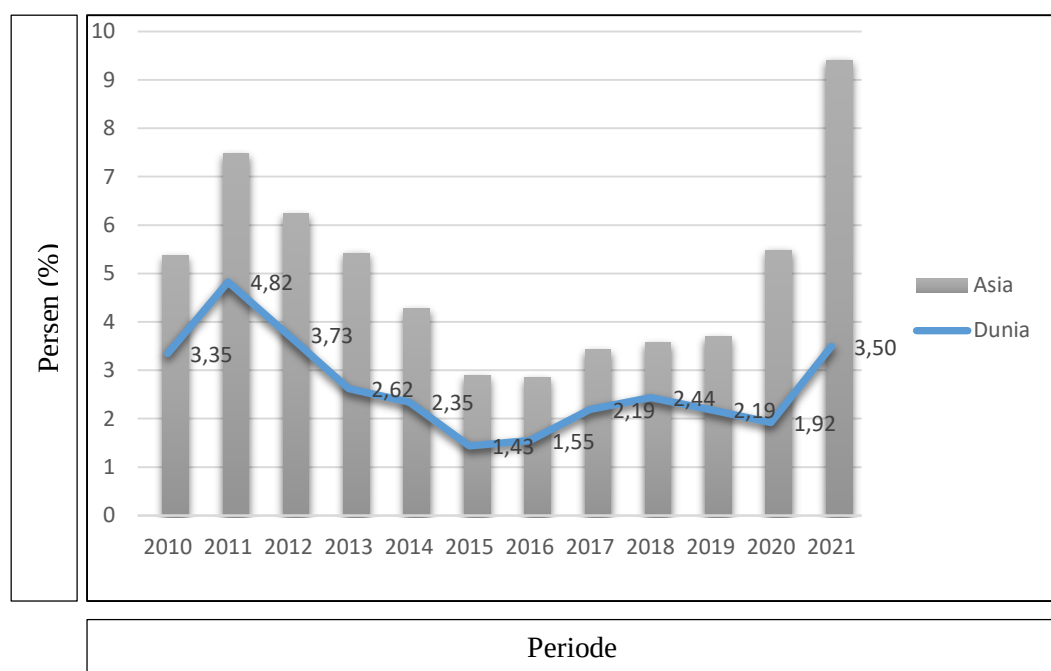
demand side. Faktor *supply side* atau disebut dengan *supply shock* adalah faktor ekonomi yang menyebabkan inflasi akibat peningkatan biaya produksi (Ahmadian & Gorji, 2015). Beberapa faktor *supply side* yang penting misalnya investasi, perubahan teknologi, harga minyak, harga pangan, perdagangan internasional, pajak, upah, dan nilai tukar.

Di sisi lain, faktor *demand side* adalah faktor ekonomi yang menyebabkan inflasi akibat *shortage* barang dan jasa di negara tersebut (Moessner, 2022). Artinya, permintaan yang terus mengalami ekspansi, namun tidak diikuti oleh peningkatan penawaran. Beberapa faktor *demand side* adalah pertumbuhan jumlah uang beredar, pengeluaran konsumsi baik rumah tangga, swasta, dan pemerintah. Jika inflasi diakibatkan oleh *supply side* maka pengambil kebijakan harus merumuskan kebijakan yang sesuai dan tepat dalam meredam efek *supply shocks*, dan sebaliknya. Hal tersebut merupakan langkah umum dalam suatu negara agar dapat mengendalikan inflasi.

Pengendalian inflasi diterapkan oleh negara-negara di kawasan Asia, namun sebelum menjelaskan terkait pengendalian inflasi di Asia, maka terlebih dahulu melihat perkembangan inflasi di Asia pasca krisis keuangan global. Gambar 1.1. menunjukkan tingkat inflasi di Asia jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi di dunia. Pada tahun tertentu perbandingan rata-rata inflasi terpaut jauh seperti pada tahun 2010 sampai 2013 dan 2020 sampai 2021. Pada tahun 2010 dunia telah dilanda resesi terparah sejak dekade terakhir dengan naik turunnya harga komoditas.

Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa tahun 2019 terdapat wabah penyakit yang memaksa semua kegiatan apapun dilakukan dirumah. Hal tersebut mengakibatkan lumpuhnya perekonomian global selama beberapa tahun.

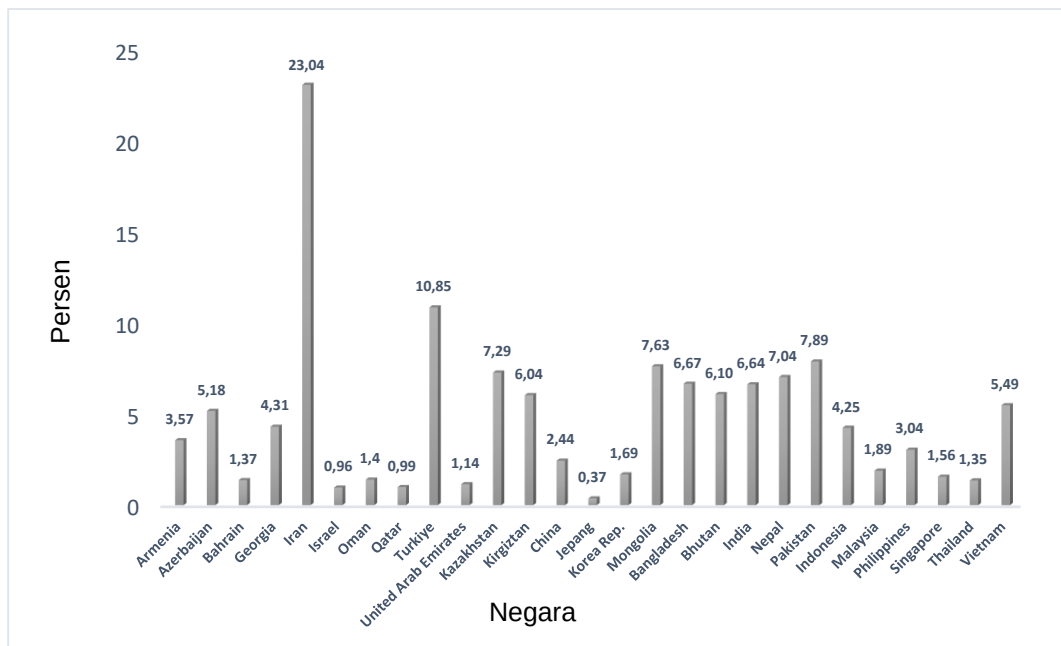
Lumpuhnya perekonomian juga mengakibatkan banyak perusahaan mengambil keputusan PHK besar besaran untuk mengurangi penegeluaran, hal ini menyebabkan pengangguran menjadi tinggi dan berdampak pada tingginya inflasi. Asia yang menjadi sumber wabah tersebut sangat terpegaruh dalam berbagai sektor khususnya ekonomi, perekomiann negara di Asia mengalami kemacetan begitu parah selama hampir dua tahun (Victor *et al.*, 2021)



Sumber: Bank Dunia, 2021

Gambar 1.1.
Perkembangan Tingkat Inflasi Asia Dengan Dunia (%)

Beberapa fenomena terjadi dalam lingkup global yang menyebabkan inflasi meningkat tinggi di tahun tertentu. Hal yang terjadi di global tentunya juga akan berpengaruh di negara-negara Asia, krisis global dan wabah menyebabkan inflasi yang melebihi rata-rata inflasi dunia. Gambar 1.2. menunjukkan bahwa Iran menjadi negara yang memiliki tingkat inflasi paling tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini karena pemerintah Iran menghapus subsidi untuk barang-barang impor. Jepang menjadi negara yang memiliki tingkat inflasi paling rendah. Hal ini karena kontrol negaranya dapat membatasi kenaikan harga barang.



Sumber: Bank Dunia, 2021

Gambar 1.2.
Rata-rata Inflasi Negara-negara Benua Asia Tahun 2010-2021 (%)

Faktor yang menyebabkan kinerja inflasi fluktuatif salah satunya disebabkan oleh karena perkembangan informasi dan teknologi. Peran teknologi informasi menjadikan terciptanya transparansi informasi harga pasar pada usaha komoditas bahan pangan. Pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi dapat mengurangi ketidakpastian harga di masyarakat sehingga membantu dalam mengontrol harga, maka dari itu inflasi dapat kendalikan (Lv *et al.*, 2019). Information and Communication Technology (ICT) adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola dan mendistribusikan informasi. Umumnya, ICT mencakup komputer, internet, telephone, televisi, radio dan alat audiovisual lainnya.

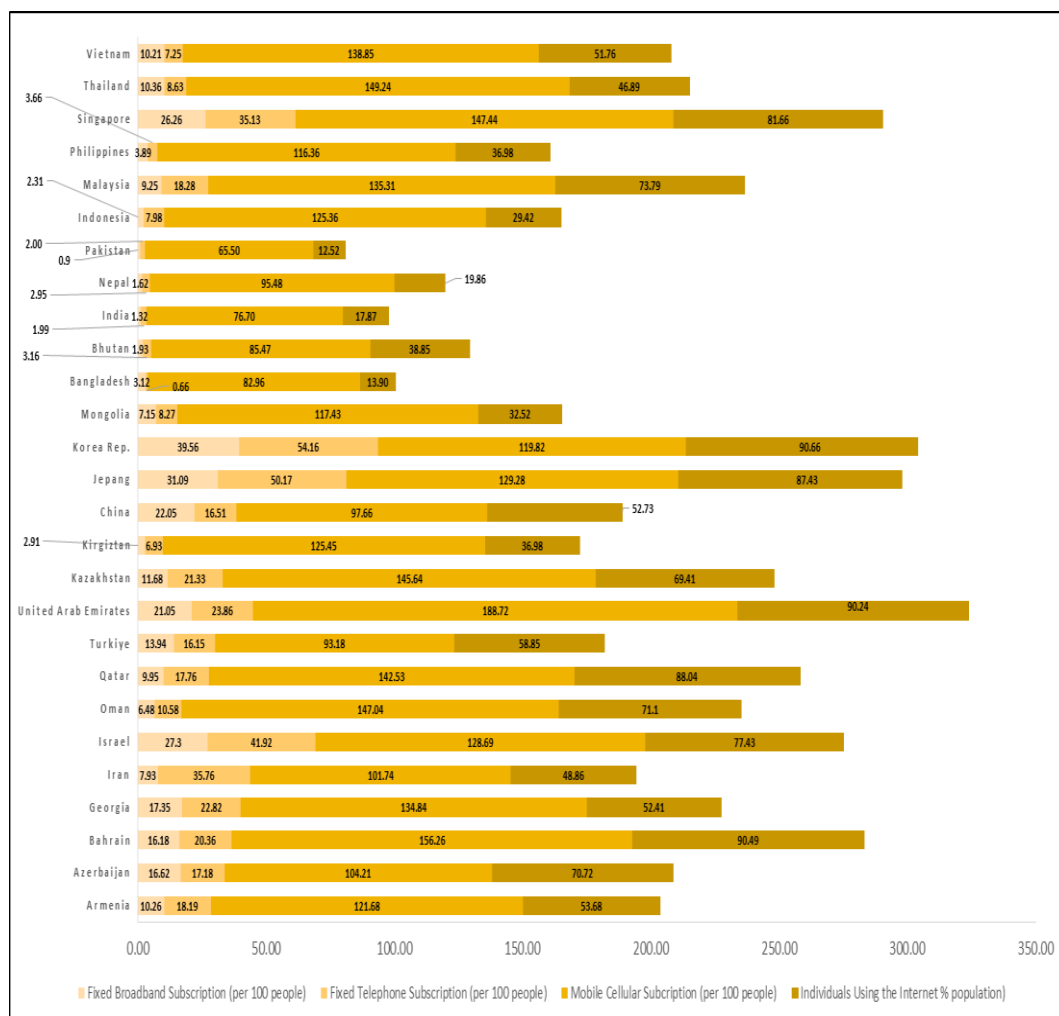
Adanya ICT ruang untuk inovasi dalam bisnis kerjasama perdagangan antar negara semakin terbuka. Menurut Blix (2015) menunjukkan bahwa pesatnya digitalisasi dapat meningkatkan daya saing dan mempengaruhi inflasi. Digitalisasi

berkaitan dengan perkembangan teknologi. Teknologi yang semakin berkembang telah meningkatkan produktivitas di suatu negara, dan meningkatkan daya saing, kemudian menunda kenaikan inflasi. Hal ini memberikan arti bahwa ICT diasumsikan dapat mengendalikan inflasi.

Menurut Goolsbee & Klenow (2018) pengaruh ICT terhadap inflasi dapat dijelaskan melalui dua jalur. Jalur pertama yaitu jalur langsung, kemajuan teknologi telah memberikan kontribusi langsung terhadap penurunan harga barang yang nantinya dapat mengendalikan inflasi. ICT semakin maju maka mendorong peningkatan produktivitas, sehingga pola konsumsi bergeser ke barang berteknologi, sebab produk-produk baru yang telah memasukkan berbagai fungsi yang dilakukan oleh barang lain. Oleh sebab itu, dapat mengurangi permintaan akan barang.

Jalur kedua yaitu jalur tidak langsung, ICT mempengaruhi inflasi melalui perilaku *buyer* dan *seller* (Goolsbee & Klenow, 2018). Munculnya platform online yang dapat mengubah perilaku konsumen. Adanya platform online memiliki implikasi yang lebih luas dalam penetapan harga sehingga mempengaruhi kinerja inflasi. Inovasi ICT memungkinkan konsumen untuk mengamati lebih mudah distribusi harga produk dan memverifikasi kualitas produk yang ingin dibeli, maka dari itu informasi terkait harga dan kualitas produk mengurangi kekuatan harga penjual, sebaliknya, untuk *seller*, kemampuan untuk mengubah harga lebih fleksibel dalam menanggapi pergeseran permintaan. Artinya, penjual menilai dengan cepat permintaan produk sendiri yang juga didasarkan pada penetapan harga pesaing. Kondisi tersebut meningkatkan efisiensi pasar dan membuat inflasi lebih terkendali (Lieber & Syverson, 2012).

Terdapat empat indikator ICT berdasarkan Bank Dunia. Empat indikator ICT beserta data dan statistik tiap negara di Asia dapat ditunjukkan pada Gambar 1.3. Indikator tersebut antara lain *fixed broadband subscriptions*, *fixed telephone subscriptions*, *mobile cellular subscriptions*, dan *individuals using the internet*. Berikut ini diuraikan perkembangan keempat indikator ICT tahun 2010-2021:



Sumber: Bank Dunia, 2021

Gambar 1.3.
Rata-rata Indikator ICT Pada Negara-negara Benua Asia Tahun 2010-2021

Gambar 1.3 menunjukkan tingkat empat indikator di Asia memang tidak terlalu tinggi terlebih lagi negara-negara yang sedang berkembang, kurangnya sosialisasi tentang teknologi dan manfaatnya menjadi salah satu masalah di setiap

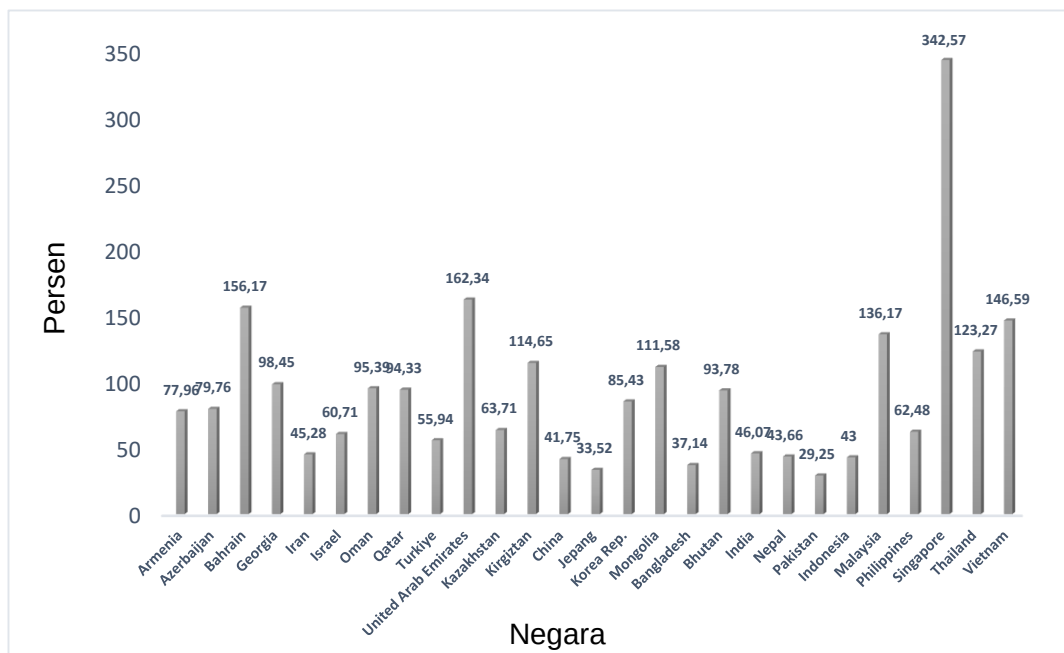
negara berkembang di Asia. Terlihat dari grafik diatas rata-rata ICT yang tinggi berada pada negara yang cukup maju seperti Jepang, Singapore, Korea, dan Uni Emirate Arab. Banyaknya negara yang tertinggal tekologinya merupakan negara mempunyai wilayah besar, hal tersebut mejadi masalah yang dihadapi untuk mensosialisasikan tentang teknologi khususnya ICT (World Bank, 2019). Wilayah yang besar, penyebaran teknologi hanya berfokus pada sebagian wilayah saja terutama hanya pada kota. Pemerintah setiap negara dapat megatasi hal seperti ini dengan memperbaiki sistem pendidikan dan pemerataan sosialisasi teknologi. Dengan tingginya tingkat ICT menandakan negara tersebut tidak tertinggal dalam hal informasi apapun.

Tingkat inflasi di Asia tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, namun, ada beberapa faktor penting yang juga dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendah nya inflasi di suatu negara salah satunya seperti keterbukaan perdagangan. Romer (1991) keterbukaan perdagangan dapat berpengaruh signifikan terhadap tinggi redahnya inflasi. Romer (1993) percaya bahwa keterbukaan perdagangan berfungsi mengendalikan fluktuasi inflasi, sehingga pembuat kebijakan merasa memiliki dampak yang menguntungkan, karena dapat membatasi insentif yang diberikan kepada pelaku ekonomi. Rogoff (1995) juga menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan suatu negara menjadi lebih terbuka, sehingga negara cenderung mengalami inflasi lebih sedikit.

Berbeda pendapat dengan Johar *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa keterbukaan perdagangan justru dapat meningkatkan ketidkdstabilan inflasi. Hal ini karena meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar, sehingga stabilitas inflasi juga akan terganggu. Nilai tukar dapat mempengaruhi inflasi melalui net expor, dan merupakan komponen agregat permintaan, kenaikan

permintaan agregat akan menyebabkan bergesernya kurva AD ke kanan (shift to the right) dalam model AD-AS, sehingga meningkatkan harga dan menyebabkan peningkatan inflasi (Hoang *et al.*, 2020).

Gambar 1.4. menunjukkan keterbukaan perdagangan secara umum di Asia masih menjadi masalah, karena derajat keterbukaan perdagangan terdapat kensenjangan. Hal ini karena banyak negara di Asia terutama negara-negara berkembang di Asia tidak dapat mengolah kekayaan alamnya dan yang terjadi negara-negara tersebut hanya mengolah bahan setengah jadi atau bahkan mentah untuk di ekspor. Hal tersebut cukup merugikan dikarenakan bahan baku setengah jadi ataupun mentah akan dihargai murah untuk di ekspor (Johar *et al.*, 2020).



Sumber: Bank Dunia, 2021

Gambar 1.4.
Rata-rata Keterbukaan Perdagangan Negara-negara Benua Asia Tahun 2010-2021 (%)

Gambar 1.4. Juga menunjukkan bahwa negara-negara yang sedang berkembang cenderung lebih rendah dibanding negara maju, hal tersebut dikarenakan kurangnya kebijakan akan *trade openness* yang sangat bisa menaikkan

pendapatan negara dan dapat mengontrol inflasi. Singapura menjadi negara di Asia yang memiliki tingkat *trade openness* paling tinggi, tidak heran kecil kemungkinan ini bisa dikatakan salah satu negara dengan perekonomian terbaik dengan mata uang yang stabil di Asia, di susul oleh United Arab Emirate dengan pengeksor minyak yang besar di dunia. Negara dengan tingkat *trade openness* terendah di tempati oleh negara Pakistan (Sulehri & Khan, 2020).

Isu ICT dan *trade openness* yang diasumsikan dapat mengendalikan inflasi telah diulas secara empiris. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Puspaningtyas & Mukhlis (2022) serta Mawusi (2021) yang memuat hubungan antara inflasi dengan keterbukaan dan juga ICT terhadap inflasi memang dapat memberikan dampak yang positif terhadap kontrol tingkat inflasi. Qin *et al.* (2021) meneliti hubungan antara ilmu teknologi inflasi dengan ZINB. Serta Lv *et al.* (2019) mengukur dan mengetahui kontribusi variabel teknologi dan globalisasi terhadap inflasi di Amerika Serikat dengan model model *Extended hybrid New Keynesian Phillips Curve* (NKPC). Dari beberapa penelitian teknologi terhadap inflasi walaupun berbeda metode dan sampel tetapi semua penelitian ini sepakat bahwa teknologi dapat mempengaruhi inflasi secara signifikan. Kemajuan teknologi dapat membuat inflasi lebih terkontrol. oleh Mansilla *et al.* (2020), Sahu & Sharma (2018), Mukhtar *et al.* (2019) dan Tee *et al.* (2018), menunjukkan bahwa *trade openness* mempengaruhi inflasi.

Inflasi tidak hanya dipegaruhi oleh *trade openness* dan ICT, dalam studi ini menggunakan beberapa variabel kontrol seperti *financial openness*, pendapatan per kapita, nilai tukar dan pengangguran. Variabel kontrol ditambahkan dalam studi ini karena dapat memengaruhi hasil estimasi, sehingga dapat meminimalisir

pengaruh lain dari luar selain variabel bebas. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar variabel-variabel tersebut menjadi variabel kontrol.

Financial openness digunakan dalam studi ini karena negara-negara di Asia dalam era saat ini menjadi lebih terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi global. Negara-negara yang mendukung keterbukaan modal berkeyakinan bahwa kebijakan tersebut dapat menghasilkan manfaat yang serupa dengan keterbukaan perdagangan, yaitu dapat mengendalikan inflasi (Gupta, 2007). *Financial openness* suatu negara semakin luas dengan sendirinya dapat mengendalikan inflasi.

Financial openness mempengaruhi inflasi melalui elastisitas permintaan uang. Guender & Mchugh-Smith (2023) berpendapat bahwa negara yang mendukung *financial openness* memberikan akses yang lebih mudah untuk investasi asing ke *home country*, sehingga otoritas moneter dengan *discipline effect*, segera melakukan kebijakan kontraktif. Oleh sebab itu, *discipline effect* otoritas moneter sebagai dampak dari *financial openness* menyebabkan inflasi terkendali. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko *capital outflow*.

Pendapatan per kapita menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas inflasi. Hal ini karena pendapatan per kapita dapat menjadi indikator daya beli masyarakat. Semakin tinggi *income*, maka masyarakat merasa lebih kaya, sehingga perilaku konsumsi semakin tidak bisa dikendalikan, maka dari itu dapat menaikkan permintaan barang (*demand shock*) dan inflasi mengalami peningkatan (Sakanko & Joseph, 2019). Disisi lain, Sahu & Sharma (2018) menjelaskan bahwa pendapatan per kapita meningkat mendorong peredaran uang tinggi di masyarakat, maka harga barang akan ikut mengalami kenaikan.

Studi empiris mengenai *trade openness* terhadap inflasi dilakukan oleh Sakanko & Joseph (2019), menunjukkan bahwa adanya hubungan jangka panjang antara tingkat inflasi dan keterbukaan perdagangan dengan harga minyak, jumlah uang beredar, nilai tukar, dan pendapatan per kapita. Sahu & Sharma (2018) menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang yang unik dan stabil antara inflasi dan variabel lainnya, seperti, keterbukaan perdagangan, pembukaan impor, depresiasi tingkat suku bunga, PDB riil dan jumlah uang beredar. Serta, Tee *et al.* (2018) menemukan hubungan positif dan signifikan antara keterbukaan perdagangan dan inflasi ketika mengadopsi pengukuran saham perdagangan komposit yang baru dikembangkan dalam sistem estimasi GMM. Namun, hubungan antara keterbukaan perdagangan dan inflasi menjadi negatif dan signifikan ketika penelitian ini menggunakan pengukuran saham perdagangan alternatif dalam sistem estimasi GMM.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspaningtyas & Mukhlis (2022) menginvestigasi pengguna internet, teknologi, pajak dan pertumbuhan ekonomi dengan metode VECM. Serta Lv *et al.* (2019) mengukur dan mengetahui kontribusi variabel teknologi dan globalisasi terhadap inflasi di Amerika Serikat dengan model *Extended Hybrid New Keynesian Phillips Curve* (NKPC). Dari beberapa penelitian teknologi terhadap inflasi walaupun berbeda metode dan sampel tetapi semua penelitian ini sepakat bahwa teknologi dapat mempengaruhi inflasi secara signifikan. Kemajuan teknologi dapat membuat inflasi lebih terkontrol.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat diketahui terdapat perbedaan hasil mengenai *trade openness* dan ICT terhadap inflasi. Studi ini mencoba meneliti hubungan *trade openness*, dan inflasi di Asia. Penggunaan metode yang kuat juga harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang benar-

benar bisa menjadi referensi, penelitian ini menggunakan metode estimasi GMM. Penelitian ini penting untuk di amati karena menggunakan tahun saat terjadi krisis ekonomi global di dunia (GFC) dimana banyak negara yang terdampak termasuk negara-negara di Asia.

Ada beberapa pembaruan penelitian yang ditawarkan pada studi ini. Pertama, obyek yang digunakan adalah 21 negara berkembang Asia. Kedua, menggunakan metode *Generalized Method Moment* (GMM). Ketiga, menambahkan variabel kontrol *financial openness*, pendapatan per kapita, nilai tukar, dan pengangguran dalam satu model. Keempat, dalam studi ini indikator ICT lebih dis-agregat dengan menggunakan indikator *fixed broadband subscriptions*, *fixed telephone subscriptions*, *mobile cellular subscriptions* dan *individuals using the internet* sebagai proxy ICT.

Uraian sebelumnya memperoleh inti permasalahan yaitu inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi. Terdapat ketimpangan inflasi di Asia pada era krisis ekonomi global sampai tahun 2020 dan pada era krisis ekonomi global inflasi di Asia dibawah rata-rata inflasi dunia. Keterbukaan perdagangan di Asia juga sudah bagus tetapi terdapat ketimpangan antar negara yang menyebabkan berbagai masalah ekonomi. Tidak hanya keterbukaan yang mempengaruhi inflasi di Asia tetapi juga banyak faktor salah satunya teknologi (ICT). Tingkat kemajuan teknologi di Asia tidak merata, ada yang tinggi, rendah dan terpaut begitu jauh. Hal tersebut menjadi salah satu ketimpangan yang cukup besar bagi negara negara di Asia. Penggunaan internet dan telepon menjadi hal yang menjadikan ketimpangan begitu besar di Asia, padahal teknologi khususnya ICT bisa jadi faktor peting mengontrol tingkat inflasi di Asia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas studi ini mengambil judul: **“Pengendalian Inflasi Di Asia:**

Studi Empiris Pengaruh *Digital Technology* Dan *Trade Openness* Pasca Krisis Keuangan Global”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *trade openness* dapat mengendalikan inflasi pasca krisis keuangan global?
2. Apakah indikator *ICT* dapat mengendalikan inflasi pasca krisis keuangan global?
3. Bagaimana tingkat kecepatan inflasi di negara-negara Asia dalam bergerak menuju garis keseimbangan (rata-rata inflasi Asia)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis peran *trade openness* dalam mengendalikan inflasi pasca krisis keuangan global di Asia.
2. Untuk menguji dan menganalisis peran indikator *ICT* dalam mengendalikan inflasi pasca krisis keuangan global di Asia.
3. Untuk mengukur dan menganalisis tingkat kecepatan inflasi di negara-negara Asia dalam bergerak menuju garis keseimbangan (rata-rata inflasi Asia).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi bagi pembaca khususnya dalam bidang ekonomi international.

2. Manfaat Empiris

- a. Hasil yang disimpulkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi.